



2023

RANKHIR RANCANGAN AKHIR



RENJA

RENCANA KERJA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG**

 Dlh Kabupaten Rembang

 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

<http://dinaslh.rembangkab.go.id>

Jl. Pemuda Km.2 Rembang

Telp. 0295-6998122



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun satu tahun sekali yang bertujuan menyelaraskan antara program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju. Selain itu dalam rancangan akhir renja 2023 memuat evaluasi hasil capaian renja tahun 2021.

Demikian penyusunan RANKHIR Rencana Kerja tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, dengan harapan dapat memberikan nilai manfaat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang, dan semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Rembang, 15 September 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG



Ir. DWI PURWANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 199103 1 009

"RANCANGAN AKHIR RKPD DINAS LH T.A 2023"

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| LAMPIRAN | iv |
| BAB I | - 1 - |
| PENDAHULUAN | - 1 - |
| 1.1. Latar Belakang | - 1 - |
| 1.2. Landasan Hukum | - 1 - |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | - 4 - |
| 1.4. Sistematika Penulisan | - 5 - |
| BAB II | - 7 - |
| EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2021 | - 7 - |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021 | - 7 - |
| 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang..... | 30 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 31 |
| 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan | 33 |
| BAB III | 41 |
| TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN | 41 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 41 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja..... | 41 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 42 |
| BAB IV | 55 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023..... | 55 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 55 |
| BAB V | 71 |
| P E N U T U P | 71 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2. 1 Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2021 DLH Kabupaten Rembang..... | - 7 - |
| Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021 | 11 |
| Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 | 13 |
| Tabel 2. 4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan (Sasaran Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021..... | 13 |
| Tabel 2. 5 Capaian Indikator Program DLH RPJMD Tahun 2016-2021 | 17 |
| Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang..... | 30 |
| Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang..... | 36 |
| Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Rembang..... | 49 |
| Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang..... | 56 |

LAMPIRAN

Halaman

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang..... | 72 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) RKPD merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, Rencana Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2023 juga tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022, sebagai bahan pertimbangan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025;
6. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
27. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2023 disusun dengan maksud merumuskan program dan Kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun, rumusan yang disusun merupakan wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan yang diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Rembang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi program/Kegiatan tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja tahun 2023.
2. Merumuskan progam dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada RKPD.
3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Kabupaten Rembang, peluang dan tantangan yang dihadapi.
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2023, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan,
berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja kegiatan dan pendanaan melalui APBD tahun 2023 sesuai RKPD Dinas Lingkungan Hidup

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2021 disusun untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan serta permasalahan yang dihadapi perangkat daerah.

Evaluasi Renja pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2021.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan anggaran sesuai dengan target kinerja dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 (sampai dengan Desember) sebagaimana berikut :

Realisasi per 31 Desember 2021 :

Tabel 2. 1 Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2021 DLH Kabupaten Rembang

| NO | Nama Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp) | Capaian Keuangan (%) | Capaian Fisik (%) |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.397.631.000 | 9.770.377.078 | 93,97 | 94,31 |
| 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.500.000 | 61.350.100 | 68,55 | 84,02 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.000.000 | 11.900.000 | 59,50 | 80,00 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 18.000.000 | 17.200.000 | 95,56 | 100,00 |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 51.500.000 | 32.250.100 | 62,62 | 80,00 |
| 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.287.610.000 | 7.873.849.539 | 95,01 | 95,01 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.035.330.000 | 7.646.829.539 | 95,17 | 95,17 |
| | - Gaji | | 5.937.949.700 | | |

| NO | Nama Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp) | Capaian Keuangan (%) | Capaian Fisik (%) |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Tunjangan ASN | | 1.708.879.839 | | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 237.280.000 | 227.020.000 | 95,68 | 95,68 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 15.000.000 | - | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 182.000 | 182.000 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Pendiidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi | 182.000 | 182.000 | 100,00 | 100,00 |
| 04 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 226.676.804 | 168.501.111 | 74,34 | 82,31 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000 | 2.999.420 | 99,98 | 100,00 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 118.425.000 | 101.243.643 | 85,49 | 100,00 |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 4.998.050 | 99,96 | 100,00 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistis Kantor | 22.000.000 | 17.037.000 | 77,44 | 80,00 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | 11.516.804 | 8.342.998 | 72,44 | 75,00 |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.960.000 | 2.860.000 | 96,62 | 98,00 |
| 7 | Penyediaan Bahan/Material | 8.550.000 | 8.550.000 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.225.000 | 22.470.000 | 40,69 | 40,69 |
| 05 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.711.043.196 | 1.597.939.926 | 93,39 | 93,49 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 830.000 | 389.000 | 46,87 | 50,00 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 45.162.196 | 38.526.408 | 85,31 | 87,00 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.200.000 | 6.324.818 | 36,77 | 42,00 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.647.851.000 | 1.552.699.700 | 94,23 | 94,23 |
| 06 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 82.619.000 | 68.554.402 | 82,98 | 85,79 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 56.324.000 | 45.912.002 | 81,51 | 83,00 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 | 7.830.100 | 78,30 | 80,00 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 16.295.000 | 14.812.300 | 90,90 | 99,00 |
| B | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 125.356.700 | 109.703.000 | 87,51 | 86,05 |
| 01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 125.356.700 | 109.703.000 | 87,51 | 86,05 |
| 1 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 109.556.700 | 99.364.000 | 90,70 | 92,00 |
| 2 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | 15.800.000 | 10.339.000 | 65,44 | 67,00 |
| C | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 328.212.800 | 316.728.860 | 96,50 | 97,89 |
| 01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 81.694.840 | 74.296.100 | 90,94 | 92,67 |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan | 54.479.840 | 48.295.500 | 88,65 | 90,00 |

| NO | Nama Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp) | Capaian Keuangan (%) | Capaian Fisik (%) |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | | | | |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 27.215.000 | 26.000.600 | 95,54 | 98,00 |
| 02 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 246.517.960 | 242.432.760 | 98,34 | 99,62 |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | 46.517.960 | 44.766.160 | 96,23 | 98,00 |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 200.000.000 | 197.666.600 | 98,83 | 100,00 |
| D | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 286.787.200 | 278.021.702 | 96,94 | 98,00 |
| 01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 286.787.200 | 278.021.702 | 96,94 | 98,00 |
| 1 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 28.857.200 | 27.751.692 | 96,17 | 98,00 |
| 2 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 257.930.000 | 250.270.010 | 97,03 | 98,00 |
| 3 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | - | - | 0,00 | 0,00 |
| E | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 25.000.000 | 23.177.500 | 92,71 | 95,53 |
| 01 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 25.000.000 | 23.177.500 | 92,71 | 95,53 |
| 1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 22.345.000 | 20.572.500 | 92,07 | 95,00 |
| 2 | Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 2.655.000 | 2.605.000 | 98,12 | 100,00 |
| F | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 59.758.300 | 26.180.000 | 43,81 | 45,00 |
| 01 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 59.758.300 | 26.180.000 | 43,81 | 45,00 |
| 1 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 59.758.300 | 26.180.000 | 43,81 | 45,00 |
| G | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 75.000.000 | 70.130.000 | 93,51 | 95,00 |
| 01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota | 75.000.000 | 70.130.000 | 93,51 | 95,00 |
| 1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga | 75.000.000 | 70.130.000 | 93,51 | 95,00 |

| NO | Nama Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp) | Capaian Keuangan (%) | Capaian Fisik (%) |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kemasyarakatan | | | | |
| H | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 110.000.000 | 107.620.500 | 97,84 | 98,00 |
| 01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 107.620.500 | 97,84 | 98,00 |
| 1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 110.000.000 | 107.620.500 | 97,84 | 98,00 |
| I | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 39.200.000 | 21.250.050 | 54,21 | 56,75 |
| 01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 39.200.000 | 21.250.050 | 54,21 | 56,75 |
| 1 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 4.000.000 | 2.320.000 | 58,00 | 60,00 |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | 35.200.000 | 18.930.050 | 53,78 | 55,00 |
| J | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.946.318.000 | 2.804.248.044 | 95,18 | 100,00 |
| 01 | Pengelolaan Persampahan | 2.946.318.000 | 2.804.248.044 | 95,18 | 100,00 |
| 1 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 25.750.000 | 25.735.000 | 99,94 | 100,00 |
| 2 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPS/TPS/SPA Kabupaten/Kota | 2.790.768.000 | 2.650.068.044 | 94,96 | 100,00 |
| 3 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 129.800.000 | 128.445.000 | 98,96 | 100,00 |
| K | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 187.000.000 | 186.234.050 | 99,59 | 100,00 |
| 01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 187.000.000 | 186.234.050 | 99,59 | 100,00 |
| 1 | Penyediaan Sarana Persampahan | 187.000.000 | 186.234.050 | 99,59 | 100,00 |
| | J U M L A H | 14.580.264.000 | 13.713.670.784 | 94,06 | |

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2021 dari anggaran yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebesar **Rp. 13.848,965.000,-** , ada refocusing anggaran sebesar **Rp 299.280.000,-.** sehingga menjadi **Rp. 13.549.685.000,-,** kemudian ada penambahan anggaran sebesar **Rp. 1.030.579.000,-** sehingga anggaran bertambah menjadi **Rp. 14.580.264.000,-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 13.713.670.784,-** atau **94,06 %** dimana pengalokasian anggaran untuk 11 Program dengan 17 Kegiatan capaian kinerja fisik per 31 Desember sebesar **86,66 %.**

Pengukuran kinerja merupakan proses yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2021 dilakukan dengan melakukan analisis capaian kinerja.

Evaluasi perencanaan telah dilakukan walaupun belum semua masalah dapat langsung diatasi, namun seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk pada peraturan yang berlaku sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan yang dilaksanakan.

Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Anggaran (Rp) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Kualitas Air (IKA) | 55,9 | 1. Program Pengelolaan persampahan | 2.946.318.000,- |
| | | | | 2. Program pengendalian Bahan B3 dan Limbah B | 25.000.000,- |
| | | | | 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah | 187.000.000,- |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Anggaran (Rp) |
|----|---------------------------------|-----------------------------|------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | regional | |
| | | | | 4. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 39.200.000,- |
| | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 94,1 | 1. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup | 328.212.800,- |
| | | | | 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat | 110.000.000,- |
| | | | | 3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 59.758.300 |
| | | | | 4. Program Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 75.000.000,- |
| | | | | 5. Perencanaan Lingkungan Hidup | 125.356.700,- |
| 2 | Meningkatnya luas tutupan lahan | Luas Tutupan lahan (Ha) | 36.800,000 | 1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 286.787.200,- |
| | TOTAL | | | | 4.182.633.000,- |

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja Daerah | Sat | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Formula | Jenis indikator |
|----|---|--------|----------------|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 61,26 | 67,67 | $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ dasar surat dirjen Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 | IKU Kab |
| 2 | Indeks Pencemaran Lingkungan | Indeks | 44,99 | 54,00 | $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU)$ | Sasaran Kabupaten |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 77,62 | 60,42 | $100 - \{(84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3\}$ | Sasaran Kabupaten |

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan (Sasaran Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % Capaian 2021 | % Capaian 2020 | RPJMD | |
|-----------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | 2021 | 2021 | | | Target Akhir 2021 | % Capaian s/d 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Indeks Kualitas Air (IKA) | 55,9 | 48,75 | 87,20 | 97,20 | 55,9 | 87,20 |
| Indeks Kualitas Udara (IKU) | 94,1 | 89,16 | 94,75 | 95,87 | 94,1 | 94,75 |
| Luas Tutupan Lahan (Ha) | 36.800,000 | 41.459 | 112,66 | 112,88 | 36.800,000 | 112,66 |

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Untuk memudahkan interpretasi efektifitas atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik

- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

Sedangkan untuk memudahkan interpretasi efisiensi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien

Pada Tahun 2021 capaian sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) target 60 realisasi 48,75, Indeks Kualitas Udara (IKU) target 90,05 realisasi 89,16 dengan capaian sasaran 99,01 % (dengan kategori amat baik).

- a. Efektifitas Indeks Kualitas Air (IKA)

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{48,75}{60} \right) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 81,25 \%$$

- b. Efektifitas Indeks Kualitas Udara (IKU)

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{90,05}{89,16} \right) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 99,01 \%$$

- c. Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \left(\frac{3.665.271.454,}{3.895.845.800} \times 100\% \right)$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 94,08\%$$

$$\text{Efisiensi} = 5,92\%$$

Untuk sasaran meningkatnya kualitas air dan udara target anggaran Tahun 2021 Rp. 3.895.845.800,- terelalisasi anggaran Rp. 3.665.271.454,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat

diketahui bahwa tingkat efisiensi program untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas air dan udara pada tahun 2021 sebesar 5,92 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori **sangat efisien**.

Pada tahun 2021 capaian sasaran Luas Tutupan Lahan dengan target 36.800,000 Ha dan terealisasi 41.459,000 Ha sehingga capaian sasaran sebesar 112,66 % termasuk dalam kategori sangat baik.

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{41.459,000}{36.800,000} \right) \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 112,66 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \left(\frac{278.021.702}{286.787.200} \times 100\% \right)$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 96,94\%$$

$$\text{Efisiensi} = 3,06 \%$$

Sehingga untuk sasaran Luas tutupan lahan target anggaran Rp. 286.787.200,- terealisasi anggaran Rp. 278.021.702,-, Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi program untuk mencapai sasaran luas tutupan lahan pada tahun 2021 sebesar 3,06 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori sangat efisien.

2. Analisa penyebab keberhasilan / Kegagalan

Dalam mencapai keberhasilan program / kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta kerjasama dari stakeholder yang terlibat. Adapun faktor yang mendukung keberhasilannya antara lain sebagai berikut :

- a. Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam menjalankan program/kegiatan untuk mencapai sasaran.
- b. Melibatkan secara langsung dengan komponen masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan
- c. Melakukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah daerah dengan instansi pemerintah luar daerah
- d. Melibatkan komponen organisasi masyarakat yang ada.

Sedangkan penyebab kegagalan pencapaian kinerja program/kegiatan adalah :

- a. Adanya Pandemi covid 19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Program/kegiatan terutama kegiatan fisik (refocusing anggaran),
- b. Mundurnya jadwal waktu pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup terutama untuk kegiatan fisik.
- c. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- d. Keterbatasan personil teknis lingkungan maupun non teknis serta sarana dan prasarana.
- e. Fungsi Laboratorium Lingkungan yang belum memadai

Adapun langkah mendatang yang akan diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan capaian kinerja dengan langkah sebagai berikut :

1. Menjalankan kegiatan sesuai schedule yang telah ditetapkan sehingga target tercapai maksimal.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran maupun perluasan tutupan lahan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program melalui pemilahan kegiatan yang langsung menyasar pada pencapaian target dan penyelesaian berbagai masalah di bidang Lingkungan Hidup

Secara rinci evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Capaian Indikator Program DLH RPJMD Tahun 2016-2021

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|-----|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Urusan Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urusan Sekretariat | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | - | - | 60 | 65 | 70 | 75 | | | |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | - | - | 75 | 80 | 85 | 90 | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|-----|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | - | - | 75 | 80 | 85 | 90 | | | |
| V | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase kehadiran ASN tepat waktu | 70 | 70 | 75 | 77 | 80 | - | - | 70 | 75 | 77 | 80 | | | |
| VI | Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Barang Inventarisasi dalam kondisi baik | 80 | 80 | 82 | 85 | 87 | - | - | 80 | 82 | 85 | 87 | | | |
| VII | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|----|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum (Formulasi : Jumlah pelayanan umum yang dilaksanakan/jumlah pelayanan umum yang ada) X 100% | - | - | - | - | - | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 90 | 94.74 | Akan Tercapai |
| | | Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur (Formulasi : Jumlah sarana prasarana yang tercukupi/ Jumlah sarana prasarana yang ditargetkan) X100% | - | - | - | - | - | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 90 | 94.74 | Akan Tercapai |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian (Formulasi : Jumlah Pelayanan Kepegawaian yang terpenuhi/Jumlah pelayanan kepegawaian yang wajib dipenuhi) x 100% | - | - | - | - | - | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 90 | 94.74 | Akan Tercapai |
| | | Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan (Formulasi : Jumlah Pelayanan keuangan yang terpenuhi/Jumlah pelayanan keuangan yang wajib dipenuhi) x 100% | - | - | - | - | - | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 90 | 94.74 | Akan Tercapai |
| VIII | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|-----------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------|------|------|------|-------|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100% | - | - | - | - | - | 65 | 70 | - | - | - | 65 | 65 | 92.86 | Akan Tercapai |
| IX | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100% | - | - | - | - | - | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 83.33 | 87.72 | Akan Tercapai |
| 5. | Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase sampah terangkut | 20.15 | 23.98 | 28.53 | 33.96 | 40.41 | - | - | 56 | 61 | 14 | 21 | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|----|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|---------------------------|------|------|-------|------|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Persentase penanganan sampah | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | - | - | 78 | 83 | 93 | 95 | | | |
| | | rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | - | 7.61 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | | |
| | | persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik | n.a | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | 32 | 41 | 10 | 10 | | | |
| | | persentase RT yang melakukan pemilahan sampah | n.a | 10 | 20 | 30 | 50 | - | - | 14 | 24 | 30 | 30.12 | | | |
| | | Persentase bank sampah aktif | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | 19 | 33 | 82.5 | 100 | | | |
| XI | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase penanganan kasus pencemaran/kerusakan LH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | indeks kualitas air | | 73% kelas A | 80% kelas A | 90% kelas A | 100 | - | - | 60 | 65 | 65 | 43.85 | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|-----|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|------|------|-------|------|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | indeks kualitas udara | n.a | diatas baku mutu | diatas baku mutu | diatas baku mutu | diatas baku mutu | - | - | 50 | 56 | 56 | 93.05 | | | |
| | | indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) | n.a | 60.15 | 62.15 | 64.15 | 66.15 | - | - | 63.5 | 66 | 65 | 64.44 | | | |
| | | persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi | n.a | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | 2 | 2 | 10 | 20 | | | |
| | | persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL | n.a | 20 | 25 | 35 | 45 | - | - | 0 | 0 | 70 | 70 | | | |
| XII | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Luasan kawasan konservasi | 145 | 147 | 150 | 152 | 154 | - | - | 0 | 0 | 42 | 42 | | | |
| | | persentase luas lahan dan hutan kritis | 70.43 | 60 | 50 | 40 | 30 | - | - | 40 | 20 | 24 | 30 | | | |
| | | persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | - | - | 20 | 20 | 24 | 12 | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | persentase sumber air dalam kondisi baik | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| | | daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | n.a | DDL ≤ 1 | DDL ≤ 1 | DDL ≤ 1 | DDL ≤ 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | persentase tutupan vegetasi | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | 65 | 65 | 69 | 50 | | | |
| XIII | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase rehabilitasi SDA | 30 | 38 | 45 | 48 | 52 | - | - | 20 | 25 | 29 | 30 | | | |
| | | persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 70 | | | |
| XIV | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase validasi data dan informasi SLHD | 70 | 75 | 80 | 83 | 75 | - | - | 100 | 100 | 85 | 75 | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|-----|---|---|---------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|-------|------|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemanfaatan data informasi lingkungan hidup | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 90 | 100 | | | |
| | | persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 95 | 100 | | | |
| XV | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indeks kualitas LH | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 67 | - | - | 63.5 | 66 | 46.6 | 64.44 | | | |
| | | persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| XVI | Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | - | - | 4 | 6 | 9 | 6 | | | |
| | | Persentase ekosistem pesisir dan laut yang ter rehabilitasi | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | 30 | 40 | 49 | 20 | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|--------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Persentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif | n.a | 10 | 20 | 30 | 40 | - | - | 10 | 30 | 30 | 40 | | | |
| XVI I | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rasio luasan RTH | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | - | - | 0 | 60 | 30 | 0.2 | | | |
| | | Persentase Luas RTH Perkotaan Publik | 11.74 | 13.25 | 14.76 | 16.34 | 17.89 | - | - | 0 | 40 | 85 | 12 | | | |
| XVI II | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lokasi pengembangan ekowisata | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | | persentase ODTW berbasis ecowisata dan jasa lingkungan | n.a | 10 | 20 | 30 | 40 | - | - | 10 | 30 | 30 | 40 | | | |
| | | NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan | n.a | 10 | 20 | 30 | 40 | - | - | 10 | 30 | 30 | 40 | | | |
| XIX | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|----|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|-------|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Peran serta masyarakat dlm konservasi | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | - | - | 0 | 0 | 25 | 40 | | | |
| | | Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0 | 0 | 75 | 100 | | | |
| XX | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Sampel Yg Memenuhi Baku Mutu (Jml Sampel Yg Memenuhi Baku Mutu/Jumlah Sampel yg Diambil) X 100 % | - | - | - | - | - | 55 | 60 | - | - | - | 95 | 57 | 95.00 | Tercapai |
| | | Persentase Lahan Kritis yang ditangani (Jumlah Pengendalian Kerusakan dan Dampak Perubahan Iklim/Jumlah Lokasi Kerusakan Lingkungan dan Dampak | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | - | 12 | 81.49 | 90.54 | Tercapai |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|-----|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Perubahan Iklim) X 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| XXI | Program Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Perusahaan Yang Memiliki Dokumen Ijin Lingkungan (Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Dokumen Ijin Lingkungan/Jumlah Perusahaan Yang Wajib Memiliki Ijin Lingkungan) X100% | - | - | - | - | - | 60 | 70 | - | - | - | 9 | 45 | 64.29 | Perlu Upaya Keras |

| NO | URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | | REALISASI KINERJA PROGRAM | | | | | Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021) | STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai) |
|-------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|-------|-------|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun | - | - | - | - | - | 9 | 40 | - | - | - | 23.52 | 45 | 112.50 | Tercapai |
| XXI I | Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Penanganan Sampah (Berat Sampah Yang Tertangani/berat Timbulan Sampah) X 100% | - | - | - | - | - | 20 | 25 | - | - | - | 15 | 82.86 | 331.44 | Tercapai |

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Analisa kinerja merupakan suatu perwujudan untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, target Renstra sampai akhir tahun 2021 dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2022 untuk IKK dan IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

| No | Indikator | SPM/ standar nasional | IK K | Target RENSTRA DLH | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-------------|---|-----------------------------|---------|--------------------|-------|-------|----------------------|---------|----------|--------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2018 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | - | √ | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | | IKK |
| 2 | Penegakan Hukum Lingkungan | - | √ | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | | IKK |
| 3 | Penanganan Sampah | - | √ | 53,7% | 50,8% | 50,7% | 49,08 % | 82,86 % | 50,7% | | IKK |
| 4 | Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk | - | √ | 10% | 12% | 12% | - | - | 100% | | IKK |
| 5 | Keberadaan Peraturan Tentang Kebersihan | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | IKK |
| 2019 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten | - | √ | 67 | 58,9 | 61,26 | 64,44 | 68,10 | 68,63 | 69,02 | IKU Kab |
| 2 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten | - | √ | 53,7% | 50,8% | 50,7% | 49,08 % | 82,86 % | 50,8% | 50,7 % | |
| 3 | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | - | √ | 50% | 60% | 70% | 23,52 % | 45% | 70% | 75% | - |
| 2020 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Indeks Pencemaran Lingkungan | - | - | - | 43,26 | 44,99 | 41,07 | 55,12 | 55,63 | 56 | IKU OPD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 5 | Indeks Kualitas Tutupan lahan | - | - | - | 74,63 | 77,62 | 23,368 | 59,29 | 59,37 | 59,46 | IKU OPD |
|---|-------------------------------|---|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|

| No | Indikator | SPM/ standar nasional | IK K | Target RENSTRA DLH | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----------|--|--------------------------|----------|--------------------|------------|--|-------------------|--------|----------|------|------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pencemaran Lingkungan | | | 43,26 | 44,99 | | 55,12 | 54,00 | | | |
| 2 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | | | 36.728,337 | 36.800,000 | | 41,459 | 41.459 | | | |
| | 2022 | | | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Air | | | | | | | | -13,21 | 1,92 | |
| 2 | Prosentase Peningkatan indeks Kualitas Udara | | | | | | | | 0,05 | 0 | |
| 3 | Prosentase Kenaikan Tutupan Lahan | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | |
| 4 | Indeks Pengelolaan Sampah | | | | | | | | 44,8 | 45 | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kelestarian lingkungan Hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berbagai cara untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan namun demikian permasalahan yang dihadapi masih seputar pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan kerusakan lahan yang diakibatkan salah satunya alih fungsi lahan.

Tantangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Dengan berkembangnya industri akan mempengaruhi peningkatan terjadinya konflik sosial yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup.

2. Bertambahnya volume timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah
3. Melestarikan dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.
4. Masih minimnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
2. Adanya peran serta pelaku usaha sektor industri dalam mewujudkan kondisi kualitas lingkungan yang lebih baik.
3. Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum memadai
4. Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah (Bank Sampah);
5. Meningkatkan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif.

Berdasarkan indentifikasi permasalahan, tantangan dan peluang tersebut diatas dapat disimpulkan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Masih terjadinya pencemaran lingkungan baik pencemaran air dan udara
2. Belum optimalnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sudah mengarah pada perencanaan partisipatif yang artinya proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah sesuai fungsi masing-masing.

Berikut akan dijabarkan telahaan usulan program dan kegiatan tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang :

1. Usulan yang diajukan masih berkuat pada program dan kegiatan yang sama dengan tahun 2022;
2. Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup masih seputar pencemaran air, udara, tanah, pengelolaan sampah dan TPA sehingga target Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai ADIPURA masih sedikit terkendala.

Tabel II.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Rembang
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|-------------------|----------------|--|---|--------|-------------------|----------------|--|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota | | | | 225.000 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota | | | | 250.000 | |
| 2 | Program Pengendalian Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup - Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kab/Kota - Penanggulangan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota - Pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kab/Kota | | | | 1.500.000 1.000.000 300.000 200.000 | Program Pengendalian Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup - Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kab/Kota - Penanggulangan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota - Pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kab/Kota | | | | 1.650.300 1.200.000 150.300 300.000 | |
| 3 | Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota | | | | 3.200.000 | Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota | | | | 4.450.000 | |
| 4 | Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3) - Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | 80.000 | Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3) - Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | 100.000 | |
| 5 | Program pembinaan dan Pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | | | 60.000 | Program pembinaan dan Pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | | | 70.000 | |

"RANCANGAN AKHIR RKPD DINAS LH T.A 2023"

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | - Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota | | | | | - Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota | | | | | |
| 6 | Peningkatan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Penyelenggaraan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk kemasyarakatan tingkat daerah/Kabupaten/Kota - | | | | 260.000 | Peningkatan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Penyelenggaraan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk kemasyarakatan tingkat daerah/Kabupaten/Kota | | | | 420.000 | |
| 7 | Program Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat - Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah kabupaten/Kota | | | | 120.000 | Program Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat - Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah kabupaten/Kota | | | | 150.000 | |
| 8 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup - Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kab/Kota | | | | 90.000 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup - Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kab/Kota | | | | 110.000 | |
| 9 | Program Pengelolaan persampahan - Pengelolaan Persampahan - Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta | | | | 2.620.000 2.500.000 120.000 | Program Pengelolaan persampahan - Pengelolaan Persampahan - Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta | | | | 2.900.000 2.750.000 150.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sudah mengarah pada perencanaan partisipatif yang artinya proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah sesuai fungsi masing-masing.

Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas mekanisme perencanaan yang diselenggarakan secara berjenjang dari bawah dimana ketiga komponen tersebut diatas terlibat secara aktif dalam perencanaan ditingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan serta tingkat Kabupaten.

Dalam penyusunan rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang telah mengakomodir kepentingan berbagai pihak misalnya usulan dari kelompok pemangku kepentingan baik dari masyarakat, LSM, perguruan tinggi maupun OPD Kabupaten Rembang yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Rancangan awal Renja adalah dokumen Renja OPD satu tahun yang mengacu pada Renstra OPD dan disinergikan dengan hasil Musrenbang Kecamatan. Untuk menghasilkan dokumen rancangan awal Renja OPD yang informatif, dilakukan serangkaian kegiatan rapat kerja yang melibatkan internal OPD dan eksternal OPD

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

| No | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume |
|-----------|--|---------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | Kab. Rembang | 1. Prosentase pemenuhan pelayanan Keuangan, form = (Pelayanan Keuangan yang terpenuhi/jml pelayanan keuangan yg wajib dipenuhi)x 100% | 90 |

| No | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume |
|----|---|----------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 2. Prosentase ketercapaian pelayanan kepegawaian, Form=(Jml Pelayanan Kepegawaian yang terpenuhi/jml pelayanan kepegawaian yang wajib dipenuhi)x100% | 90 |
| | | | 3. Prosentase ketercapaian pelayanan umum, form= (jml pelayanan umum yg dilaksanakan/jml pelayanan umum yg harus/wajib dilaksanakan) x100% | 90 |
| | | | 4. Prosentase ketercukupan jasa penunjang dan sarana prasarana aparatur ,form= (jml sarana dan Prasarana yg tercukupi/jml sarana prasarana yg ada)x100% | 80 |
| a | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas LH | Jml Indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan | 8 |
| b | Administrasi keuangan perangkat daerah | Dinas LH | Prosentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 90 |
| c | Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas LH | Prosentase pemenuhan pelayanan kepegawaian | 90 |
| d | Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah | Dinas LH | | 90 |
| e | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas LH | Prosentase ketercapaian pelayanan umum | 90 |
| f | Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas LH | Prosentase ketercukupan jasa penunjang yang terlaksana , form = (jml jenis jasa penunjang yang tercukupi/jml jenis jasa penunjang yg wajib ada)x100% | 80 |
| g | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Dinas LH | Prosentase jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara, form (jml jenis pemeliharaan BMD yg dilaksanakan /jml jenis pemeliharaan BMD yg wajib dilaksanakan)x100% | 80 |
| h | Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Dinas LH | | 90 |

| No | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume |
|-----|---|--------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Rembang | Prosentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak melebihi cemar ringan, Form = (Jml Hasil Pemantauan tidak melebihi cemar ringan / Jml Pemantauan) x 100% | 60 |
| a | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota | Kab. Rembang | Jumlah Dokumen pemantauan lingkungan | 3 |
| b | Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kab/Kota | Kab. Rembang | | |
| c | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota | Kab. Rembang | Jumlah lokasi kerusakan lingkungan yang tertangani | 4 |
| III | PROGRAM KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Kab. Rembang | Prosentase Luas RTH Baru/terfasilitasi, (form = luas RTH baru/terfasilitasi/Luas RTH Tahun berjalan) x 100% | 1 |
| a | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota | Kab. Rembang | Jumlah Lokasi RTH baru/Terfasilitasi | 4 |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH | Kab. Rembang | Prosentase pengelolaan sampah Form ((Jml sampah berkurang/jmlh potensi timbulan sampah)+(jml sampah tertangani/jml potensi timbulan sampah)x100% | 38 |
| a | Pengelolaan Sampah | Kab. Rembang | Jumlah sampah yang dikelola | 92.761,90 ton/th |
| b | Pembinaan Pengawasan Pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Kab. Rembang | | |
| V | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Kab. Rembang | Prosentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup (Form=Jml Capaian Masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH/ Target Jml Masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH)x100% | 70 |

| No | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume |
|-------------|--|--------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Kab. Rembang | Jml Masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH | 640 org |
| VI | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Kab. Rembang | Prosentase penghargaan LH untuk sekolah | 3,25 |
| a | Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup Tingkat Daerah Kab/Kota | Kab. Rembang | Jumlah penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten | 17 |
| VII | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3 | Kab. Rembang | Prosentase perusahaan yang memiliki TPS Limbah B3 | 28 |
| a | Penyimpanan sementara Limbah B3 | Kab. Rembang | Jml Perusahaan yang memiliki ijin penyimpanan sementara Limbah B3 | 5 |
| b | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Kab. Rembang | | |
| VIII | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Rembang | Prosentase ketercapaian target IKLH | 100 |
| a | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Kab/Kota | Kab. Rembang | Prosentase dokumen perencanaan LH yang tersusun, form = dokumen perencanaan LH Kab yg tersusun/dokumen perencanaan LH kabupaten yg wajib disusun)x100% | 100 |
| IX | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PPLH | Kab. Rembang | Prosentase ijin lingkungan yang terfasilitasi,form=(jml ijin lingkungan yg dikeluarkan pemkab / jml permohonan ijin lingkungan)x100% | 100 |
| a | Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Kab. Rembang | Jml ijin lingkungan yang dikeluarkan Pemkab | 30 |
| X | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Rembang | Prosentase kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan | 85 |

| No | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume |
|-----------|---|---------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota | Kab. Rembang | Prosentase aduan yang tertangani,form=(jml aduan yg tertangani/jml aduan)x100% | 100 |

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, tenokratik, partisipatif *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan yang dicapai dari semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada prioritas sasaran pembangunan nasional dan propinsi Jawa Tengah tahun 2023..

Kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat lingkungan masyarakat yang sehat dan nyaman. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Pengakuan akan pentingnya penyelenggaraan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

A. Tujuan Jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya kualitas tutupan lahan

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi kedua RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yaitu :

Misi 3 : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

- Tujuan pada misi ketiga adalah “*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*”

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara
2. Meningkatnya luas tutupan lahan
3. Meningkatnya Kinerja pengelolaan sampah

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Pada Tahun Anggaran 2023, penyelenggaraan urusan wajib bidang lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang melaksanakan 10 Program, 15 Kegiatan, 40 Sub Kegiatan dan 51 Pekerjaan.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - A Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Renstra Renja OPD
 - B Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD

- Penyusunan Dokumen-dokumen anggaran (RKA/DPA)
 - Jasa Admin e-planing, e budgeting, Sirup /RUP, e-sakip, e monev.
- C Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Maturitas SPIP.
 - Survey Kepuasan Masyarakat
 - Jasa publikasi/Iklan
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- A Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- B Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penyediaan Penatausahaan Keuangan SKPD
- C Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- A Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Komponen instalasi listrik /Bahan Kelistrikan
- B Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- C Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Alat Rumah Tangga dan Bahan Pembersih Kantor
 - D Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makan minum Harian Pegawai
 - E Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Barang Cetak, Penggandaan dan Penjilidan
 - F Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan Bacaan
 - G Penyediaan Bahan Material Kantor
 - Penyediaan ATK
 - H Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- A Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - B Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet, Sumber daya air dan listrik.
 - C Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - D Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Kontrak SK Bupati 16 Org, THL 81 org)
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- A Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - B Pemeliharaan Mebelair
 - Pemeliharaan Mebelair kantor
 - C Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- D Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
 - 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - A Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.
 - Pemantauan Kualitas lingkungan (IKA, IKU, IKTL)
 - B Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim
 - Proklamasi
- III PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - 1 Pengelolaan Keaneekaragaman hayati Kabupaten/Kota
 - A Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - Pemeliharaan Taman
 - Penyiraman RTH Perkotaan
- IV PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - 1 Pengelolaan Sampah
 - A Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Operasional Pengumpulan, Pengangkutan Sampah serta Pengelolaan Sampah di TPA.
 - C Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan
 - Pelatihan Pengelolaan Sampah (Desa Tasiksono dan Desa Dasun Kecamatan Lasem).
 - Peringatan Hari Pungut Sampah Nasional (HPSN)
 - Peringatan Hari Lingkungan Hidup

- Peringatan World Clean Up Day (WCD)
- V PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
- 1 Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- A Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
 - Pembinaan Saka Kalpataru
 - B Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - Pembinaan Masyarakat Pelestari Lingkungan Hidup (Kalpataru)
 - C Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - Pemantauan Kota Bersih dan Sehat Lingkungan (Adipura)
- VI PROGRAM PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
- 1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- A Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Penilaian Gerakan PBLHS (Program Penghargaan Sekolah Adiwiyata)
- VII PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
- 1 Penyimpanan sementara Limbah B3
- A Fasilitasi Pemenuhan Komitmen ijin Penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik

- Pelayanan Perijinan Sementara limbah B3
- B Verifikasi lapangan untuk memastikan Pemenuhan persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Verifikasi Lapangan Pemenuhan persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

VII PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

I

- 1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - A Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - Penyusunan IKLH
 - Penyusunan IKPLHD
 - B Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota
 - Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL dan izin)
- 2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD / RPJMD
 - A Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - Penyusunan KLHS RDTR Koridor Pantura Kranggan Sluke
 - B Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD
 - Penyusunan KLHS RPJPD
 - Penyusunan KLHS RPJMD

IX PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PPLH

- 1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - A Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang ijin Lingkungan Hidup, ijin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pelaku Usaha dan Kegiatan Penerima Ijin Lingkungan

X PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1 Penyelesaian Pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

A Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten

B Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan Lingkungan Hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan

- Penyelesaian sengketa Lingkungan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan
- Verifikasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat

Tabel 3. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Rembang

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 15.387.782.800 | | | | 23.491.642.848 |
| | URUSAN NON BIDANG | | | | 12.428.433.800 | | | | 13.391.342.848 |
| | I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Prosentase Keselarasan Perencanaan Terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Rembang | 90 | 12.428.433.800 | | | 100 | 13.391.342.848 |
| | 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah capaian indikator kinerja | Kab. Rembang | 8 | 50.000.000 | APBD | | 100 | 90.000.000 |
| | 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase pelaporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu | Kab. Rembang | 90 | 9.587.897.800 | APBD | | 100 | 10.063.486.848 |
| | 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kab. Rembang | 90 | 169.314.000 | APBD | | 100 | 201.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| | 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Rembang | 80 | 2.467.536.000 | APBD | | 100 | 2.599.856.000 |
| | 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Rembang | | 153.686.000 | APBD | | | 220.000.000 |
| | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 2.959.349.000 | | | | 7.523.349.000 |
| | II | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Rembang | 60 | 525.000.000 | | | 100 | 250.000.000 |
| | 1 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota | Kab. Rembang | 40 ijin | 150.000.000 | APBD | | 100 | 250.000.000 |
| | 2 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota | Kab Rembang | 2 Dokumen | 375.000.000 | APBD | | 100 | 200.000.000 |

"RANCANGAN AKHIR RKPD DINAS LH T.A 2023"

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|---|------------------------------------|--------------------|------------------------|---|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|--|-----|---------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | III | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Prosentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak melebihi cemar ringan, Form = (Jml Hasil Pemantauan tidak melebihi cemar ringan / Jml Pemantauan) x 100% | Kab. Rembang | 60 | 115.000.000 | | | 100 | 1.650.300.000 |
| | | | | 1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota | Jumlah Dokumen pemantauan lingkungan | Kab. Rembang | 1 dok | 115.000.000 | | | 100 | 120.000.000 |
| | | | | IV | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Prosentase Luas RTH Baru/terfasilitasi, (form = luas RTH terfasilitasi/Luas RTH Tahun lalu) x 100% | Kab. Rembang | 6 | 385.000.000 | | | 100 | 4.450.000.000 |
| | | | | 1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota | Jumlah Lokasi RTH baru/Terfasilitasi | Kab. Rembang | 6 | 385.000.000 | APBD | | 100 | 4.450.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|---|--|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | |
| | V | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Jml Total Perusahaan yang memiliki ijin penyimpanan sementara Limbah B3 sampai dengan tahun berjalan | Kab. Rembang | 26 | 30.000.000 | | | 100 | 100.000.000 |
| | 1 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jml Perusahaan yang memiliki ijin penyimpanan sementara Limbah B3 | Kab. Rembang | 6 | 30.000.000 | APBD | | 100 | 85.000.000 |
| | VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun | Kab. Rembang | 40 dok | 50.000.000 | | | 100 | 70.000.000 |
| | 1 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun | Kab. Rembang | 40 dok | 50.000.000 | APBD | | 100 | 70.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| | VII | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 60 | 60 | 20.000.000 | APBD | | 100 | 420.000.000 |
| | 1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota | Kab. Rembang | 600 org | 20.000.000 | APBD | | 100 | 420.000.000 |
| | VIII | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Kab. Rembang | 5 | 80.000.000 | APBD | | 100 | 150.000.000 |
| | 1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota | Kab. Rembang | 2 | 80.000.000 | APBD | | 100 | 150.000.000 |

"RANCANGAN AKHIR RKPD DINAS LH T.A 2023"

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| | IX | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Rembang | 80 | 40.000.000 | APBD | | 100 | 90.000.000 |
| | 1 | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota | Kab. Rembang | 100 | 40.000.000 | APBD | | 100 | 90.000.000 |
| | X | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Kab. Rembang | 99 | 1.714.349.000 | APBD | | 100 | 2.750.000.000 |
| | 1 | Pengelolaan Sampah | Kab. Rembang | 92.025,69 | 1.714.349.000 | APBD | | 100 | 2.750.000.000 |
| | | Jumlah komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah | | 120 | | | | | |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup yang diusulkan melalui dana APBD Kabupaten Rembang tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2023 RKPD

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|------|----|---|------|---|---|--------|-------------------|--|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 15.387.782.800 | | | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 15.387.782.800 | | | |
| 2 | 11 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 12.428.433.800 | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dok | Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah | | 20.000.000 | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 dok | Tersedianya dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA SKPD | | 15.000.000 | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|----------|-----------|----------|-------------|---|--|--------|-------------------|--|-------------------|---|----------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 lap | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 9.587.897.800 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 124 ASN | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | 9.384.697.800 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dok | Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 193.200.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | Tersedianya Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 10.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 169.314.000 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|------|----|---|------|---|--|--------|-------------------|--|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | 10.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 12.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | Tersedianya peralatan Rumah Tangga | 12.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | Tersedianya bahan logistik kantor | 25.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 tahun | Tersedianya Barang cetak dan penggandaan | 11.814.000 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|----------|-----------|----------|-------------|---|---|--------|-------------------|--|-------------------|--|----------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 tahun | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3.500.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 7 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 paket | Tersedianya bahan/material | 20.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 2.467.536.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 tahun | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat | 1.600.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bl | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 95.000.000 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|----------|-----------|----------|-------------|---|---|--------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 bl | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | 10.000.000 | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | 16 TG KONTR AKI, 81 THL | 2.360.936.000 | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 153.686.000 | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | 98.686.000 | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | Terlaksananya pemeliharaan Mebel | | 5.000.000 | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|------|----|---|------|---|---|--------|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 15.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 35.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 525.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | | | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dok | Tersusunnya RPPLH Kab/Kota | 100.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.01 | 2 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah | 1 dok | Tersedianya dokumen telaahan kebijakan yang | 50.000.000 | | | | |

"RANCANGAN AKHIR RKPD DINAS LH T.A 2023"

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana |
|------|----|---|------|----|---|--------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | | telah mengakomodir RPPLH Kab/Kota | | | | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.02 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | 375.000.000 | | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.02 | 01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | | | | | | | 134.000.000 | | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD /RPJMD | | | | | | | 241.000.000 | | | |
| 2 | 11 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 115.000.000 | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | 115.000.000 | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|------|----|---|------|---|--|--------|-------------------|--|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2 dok | Tersusunnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut | 45.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 dok | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 70.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | 385.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | 385.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 17 lokasi | RTH yang dikelola | 385.000.000 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|------|----|---|------|---|---|--------|---|---|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | | | dan teknik penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 | | | | | |
| 2 | 11 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 6 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 6 | 2.01 | 3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah | 1 lap | Meningkatnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, persetujuan lingkungan, seraf kelayakan operasi diterbitkan oleh | 50.000.000 | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana |
|------|----|---|------|--|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | pemerintah daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 2 | 11 | 8 | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | | 20.000.000 | | |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 20.000.000 | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|------|----|---|------|---|---|--------|-------------------|---|-------------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | 1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | | | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | 87 lembaga | meningkatnya jumlah lembaga kemasyarakatan /institusi skala Kabupaten/Kota dan/atau yang terdaftar di kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDMnya | 5.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | 2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 59 dok | trelaksananya pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup | 8.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 8 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 600 org | Meningkatnya jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota | 7.000.000 | | | | |

"RANCANGAN AKHIR RKPD DINAS LH T.A 2023"

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|---|---|--------|-------------------|--|-------------------|--|----------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 1 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | | | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 1 dok | Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang dikelola | 20.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | 1 dok | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerrapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan | 20.000.000 | | | | |
| 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | 1.714.349.000 | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | | | | | | 1.714.349.000 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif 2023 | Jenis Kegiatan | Sumber Dana | | |
|------|----|----|------|---|---|--------|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 3 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | Terlaksananya penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 1.554.349.000 | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 4 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | | Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah | 160.000.000 | | | | |

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Perangkat Daerah lain.

Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematis menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif. Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Kabupaten Rembang yang Gemilang.

Rembang, 15 September 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

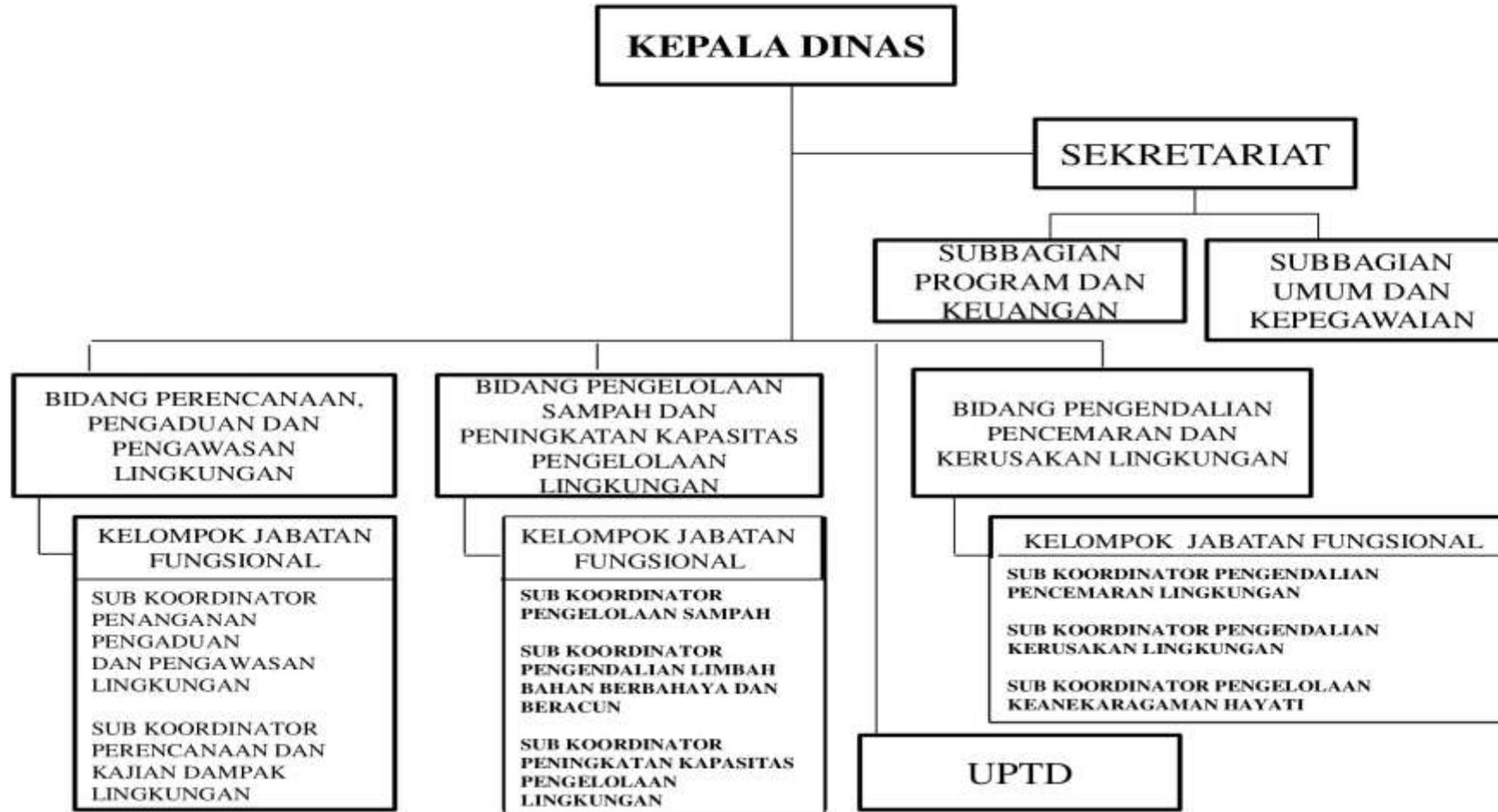


Ir. DWI PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1965704 199103 1 009

"RANCANGAN AKHIR RKPD DINAS LH T.A 2023"

Lampiran 1.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG**



"RANCANGAN AKHIR RKPД DINAS LH T.A 2023"